RENCANA KERJA
(RENJA)
Tahun 2023

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur
Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321423 Fax (o474) 321423

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Soekarno Hatta, No Telp (0474) 321423, Fax (0474) 321423
Malili ,92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab bertugas :
   a. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
   b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun; dan
   c. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
2. Ketua bertugas :
   a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
   b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan danpetunjuk kepada tim penyusun;
   c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim penyusun kepada penanggung jawab; dan
   d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3. Sekretaris bertugas :
   a. Menyusun dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja tahun 2023;
   b. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
   c. Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2023; dan
   d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
4. Anggota bertugas :
   a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah;
   b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
   c. Melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
   d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
   e. Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2023;
   f. Menyesuaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang telah ditetapkan; dan
   g. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal Juni 2022
KEPALA DINAS,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP:19751001 199612 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
	3.1 Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional/Propinsi	47
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
	3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB V	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Tabel 2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel 4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Tabel 5 : Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Tabel 6 : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah semata kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 21 ayat 3, bahwa Renja-SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan.

Malili, Juni 2022
KEPALA DINAS,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP:19751001 199612 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, RENJA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan perangkat daerah untuk merumuskan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

RENJA PERANGKAT DAERAH merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA PERANGKAT DAERAH dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan RENJA PERANGKAT DAERAH harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sementara itu terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan RENJA yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan RENJA yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada RENSTRA SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan RENJA PERANGKAT DAERAH bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi RENJA PERANGKAT DAERAH memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan PERANGKAT DAERAH terhadap RENSTRA SKPD, evaluasi pelaksanaan RENJA PERANGKAT DAERAH tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam RENJA PERANGKAT DAERAH didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah.
6. Progaram/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya. Sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n + 1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan RENJA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 juga berpedoman pada Visi dan Misi

Presiden RI 2019-2024 dimana visi : “ Terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” dan misi “ (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh rakyat, (8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya, (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021– 2026.

Bagan alur penyusunan RENJA OPD adalah sebagai berikut :

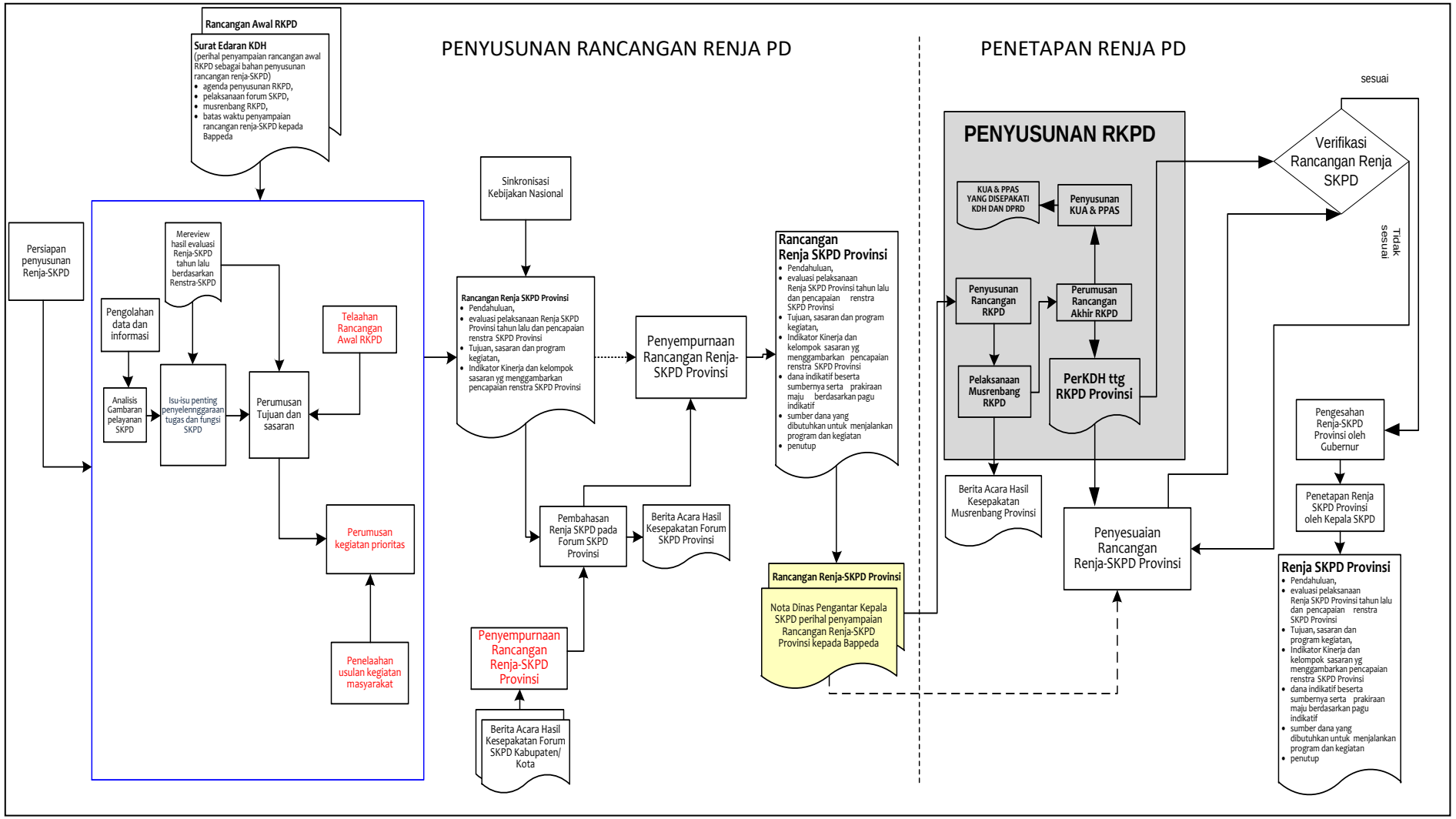
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PD
PENETAPAN RENJA PD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Rancangan Renja SKPD Provinsi
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota
Rancangan Renja SKPD Provinsi
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA & PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur
Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun Anggaran 2023 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENJA PERANGKAT DAERAH adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA PERANGKAT DAERAH adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN,** Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.

BAB V **PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur s/d Tahun berjalan(*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Progran (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja SKPD 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9*	*10=5+7+9*	*11=10/4*
2					WAJIB									
2	17				KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	-	95 %	98,93 %	104,13 %	95 %	96,96%	96,96%

2	**17**	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	%	-	100	%	100 %		100	%	100	%	100	%	100%	%
2	**17**	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	13	dokumen	-	3	dokumen	3	dokumen	100	%	3	dokumen	6	dokumen	47%	%
2	**17**	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	10	dokumen	-	2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	4	dokumen	40%	%
2	**17**	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	10	dokumen	-	2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	4	dokumen	40%	%
2	**17**	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	50	dokumen	-	10	dokumen	10	dokumen	100	%	10	dokumen	20	dokumen	40%	%
2	**17**	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	%	-	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	28	orang	-	23	orang	22	orang	95,65	%	28	orang	28	orang	100%	%
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	90	dokumen	-	18	dokumen	18	dokumen	100	%	18	dokumen	36	dokumen	40%	%

2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	%	-	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	10	dokumen	-	4	dokumen	4	dokumen	100	%	2	dokumen	6	dokumen	60%	%
2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	100	%	-	100	%	101,9	%	101,9	%	100	%	100,95%		101%	%
2	**17**	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	5	dokumen	-	4	dokumen	4	dokumen	100	%	4	dokumen	8	dokumen	160%	%
2	**17**	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	-	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%
2	**17**	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	60	laporan	-	12	laporan	12	laporan	100	%	12	laporan	24	laporan	40%	%

2	**17**	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI	14	orang	-	2	orang	1	orang	50	%	2	orang	3	orang	22%	%
2	**17**	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10	orang	-	10	orang	10	orang	100	%	6	orang	10	orang	100%	%
2	**17**	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	100	%	-	100	%	96,48	%	96,48	%	100	%	98,24	%	98,24%	%
2	**17**	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50	jenis	-	10	jenis	9	jenis	90	%	10	jenis	19	jenis	38%	%
2	**17**	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	105	unit	-	35	unit	35	unit	100	%	4	unit	39	unit	38%	
2	**17**	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	13	unit	-	1	unit	1	unit	100	%	2	unit	3	unit	23%	
2	**17**	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	140	jenis	-	26	jenis	26	jenis	100	%	20	jenis	46	jenis	33%	
2	**17**	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	15	jenis	-	3	jenis	3	jenis	100	%	3	jenis	6	jenis	40%	
2	**17**	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	300	eksemplar	-	60	eksemplar	60	eksemplar	100	%	60	eksemplar	120	eksemplar	40%	%

2	**17**	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1000	orang	-	176	orang	166	orang	95	%	282	orang	448	orang	45%
2	**17**	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1140	kali	-	457	kali	400	kali	87,52	%	294	kali	694	kali	61%
2	**17**	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	215	dokumen	-	-		-		-		50	dokumen	50	dokumen	24%
2	**17**	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	%	-	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100%
2	**17**	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	14	unit	-	61	unit	61	unit	100	%	4	unit	65	unit	465% %
2	**17**	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10	unit	-	11	unit	11	unit	100	%	4	unit	15	unit	150% %
2	**17**	01	2.08	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	9	unit	-	1	unit	1	unit	100	%	-		1	unit	12% %
2	**17**	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	-	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100% %
2	**17**	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah suat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	7500	surat	-	1300	surat	1300	surat	100	%	1500	surat	2800	surat	38% %

2	**17**	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	5	rekening	-	5	rekening	5	rekening	100	%	5	rekening	5	rekening	100%	%
2	**17**	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantorn yang terbayarkan	5	orang	-	4	orang	4	orang	100	%	4	orang	4	orang	80%	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	%	-	100	%	92	%	92	%	100	%	96	%	96%	
2	**17**	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10	unit	-	10	unit	10	unit	100	%	10	unit	10	unit	100%	%
2	**17**	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	54	unit	-	43	unit	34	unit	79,07	%	45	unit	45	unit	84%	%
2	**17**	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	unit	-	2	unit	2	Unit1	100	%	1	unit	2	unit	67%	
2	**17**	**02**			**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki**	14,72	%	-	-		-		-		6	%	6	%	41%	

						izin usaha simpan pinjam									
2	**17**	02	**2.02**		Penertiban Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	13,41 %	-	-	-	-	4,92 %	4,92 %	37% %
2	**17**	02	**2.02**	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	120 KSP/ USP	-	-	-	-	15 KSP /USP	15 KAP/ USO	13%
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase koperasi yang berkualitas**	36,13 %	-	29,12 %	29,41 %	100,99 %	30,82 %	30,82 %	86%
2	**17**	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	90,20 %	-	50,15 %	74,11 %	147,77 %	70,35 %	74,11 %	83% %

					Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	kabupaten/kota															
2	**17**	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi	166	koperasi	-	126	koperasi	126	koperasi	100	%	136	koperasi	136	koperasi	82%	%
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase koperasi sehat**	35,75	%	-	30,02	%	31,88	%	108,60	%	31,25	%	31,88	%	90%	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam dari koperasi yang dinilai kesehatannya	55,81	%	-	30,02	%	31,88	%	108,60	%	49,20	%	49,20	%	89%	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP	240	koperasi	-	15	koperasi	15	koperasi	100	%	15	koperasi	30	koperasi	13%	%

2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan**	15,61	%	-	9,92	%	10 %	10080 %	10,71	%	10,71	%	69% %
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	40,93	%	-	10,25	%	11,53 %	112,3 %	17,74	%	17,74	%	44% %
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	75	koperasi	-	15	koperasi	15 koperasi	100%	15	koperasi	30	koperasi	40% %
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Persentase peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi**	6,75	%	-	-		-	-	3,15	%	3,15	%	47% %
2	**17**	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Ynag Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses	6,75	%	-	-		-	-	3	%	3	%	45%

						pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha										
2	**11**	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	84	koperasi	-	-	-	-	20	koperasi	20	koperasi	24%	%
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha**	60	%	-	35	%	37,38	%	106,8	%	45	%	45	%	75%	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Jumlah wirausaha baru berskala mikro	168	WUB	-	105	WUB	117	WUB	111,43	%	108	WUB	117	WUB	70%	%

					Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan											
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	1266	Usaha mikro	-	300	Usaha mikro	303	Usaha mikro	104,33	%	241	Usaha mikro	544	Usaha mikro	43%
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra	100	Usaha mikro dan kecil	-	-		-		-		50	Usaha mikro dan kecil	50	Usaha mikro dan kecil	50%
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	200	Usaha mikro	-	37	Usaha mikro	37	Usaha mikro	100	%	40	Usaha mikro	40	Usaha mikro	20%
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (responsive gender)	350	Usaha mikro dan kecil	-	-		-		-		70	Usaha mikro dan kecil	70	Usaha mikro dan kecil	20%

2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	105	Usaha mikro	-	-		-	-		90	Usaha mikro	86%				
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Rasio pertumbuhan skala usaha mikro**	8,16	%	-	3,33	%	3,68	%	110,51	%	3,89	%	3,89	%	48%	%	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro	8,30	%	-	6,67	%	6,71	%	100,59	%	7,05	%	7,05 %		85%	%	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, sera Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha	90	Usaha mikro dan kecil	-	21	Usaha mikro dan kecil	21	Usaha mikro dan kecil	100	%	10	Usaha mikro dan kecil	32	Usaha mikro dan kecil	36%	%	
					PILIHAN																%
					PERDAGANGAN																%

3	**30**	**03**			**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun /direvitalisasi	10	%	-	10	%	9,14	%	91,4	%	10	%	9,57	%	96%	%
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan	25	pasar	-	6	pasar	6	pasar	100	%	2	pasar	6	pasar	24%	%
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/ direvitalisasi serta sarana dan prasarananya	25	pasar	-	6	pasar	6	pasar	100	%	2	pasar	6	pasar	24%	%
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	70	%	-	-		-		-		70	%	70	%	100%	%
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	37	Pengelola pasar	-	-		-		-		5	Pengelola pasar	5	Pengelola pasar	14%	%
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**	7,86	%	-	9	%	8,27	%	91,88	%	8	%	8,14	%	104%	%

3	**30**	04	2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga barang kebtutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	44	%	-	44	%	44,44	%	101	%	44	%	44,22	%	101%	%
3	**30**	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	1300	Jurnal harga	-	260	Jurnal harga	248	Jurnal harga	95,38	%	260	Jurnal harga	508	Jurnal harga	39%	%
3	**30**	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar	10400	RTM	-	1800	RTM	1800	RTM	100	%	2000	RTM	3800	RTM	37%	
3	**30**	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsididan pestisida	100	%	-	100	%	72,07	%	72,07	%	100	%	81.04	%	81,04%	
3	**03**	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Pengunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	420	laporan	-	84	laporan	81	laporan	100	%	82	laporan	63	laporan	75%	
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase peningkatan nilai ekspor**	15	%	-	15	%	33,45	%	223	%	15	%	54,47	%	24,23%	
3	**30**	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran	Persentase produk yang memperoleh	60	%	-	20	%	20	%	100	%	40	%	40	%	66,66%	%

					Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	fasilitas promosi - dagang												
3	**30**	05	2.01	01	Pembinaan dan Pegembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha	1140	usaha	-	220	usaha	215	usaha	97,93	%	225	usaha	440	usaha	38,59%	%
3	**30**	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional	5	produk	-	-	-	-	-	-	-	1	produk	1	produk	20%	%
3	**30**	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang	5	produk	-	-	-	-	-	-	-	1	produk	1	produk	20%	
3	**30**	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	125	Pelaku usaha	-	25	Pelaku usaha	25	Pelaku usaha	100	%	25	Pelaku usaha	50	Pelaku usaha	40%	
3	**30**	**06**			**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP**	5	%	-	5	%	4,05	%	81	%	5	%	4,05	%	81%	

3	**30**	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berpa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	75	%	-	60	%	54,14	%	90,23	%	50,67	%	52,41	%	69,88%	%
3	**30**	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	4725	Alat UTTP	-	1096	Alat UTTP	1230	Alat UTTP	112,22	%	145	Alat UTTP	1.375	Alat UTTP	29,10%	
					PERINDUSTRIAN																
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Jumlah peratutan Bupati (Perbup) Kawasan industry yang ditetapkan**	1	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	%	1	dokumen	0	dokumen	0%	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industry yang dievaluasi	1	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	%	1	dokumen	0	dokumen	0%	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupate/Kota	Jumlah revisi dokumen siteplan dan amdal	1	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	dokumen	0%	

3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM pangan dan hadycraft yang difasilitasi dan dibina	296	IKM	-	58	IKM	58	IKM	100	%	20	IKM	78	IKM	26,35%
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP	100	IKM	-	20	IKM	20	IKM	100	%	10	IKM	30	IKM	30%
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM dalam sentra kawasan industri yang dibina dan dikembangkan	80	IKM	-	30	IKM	30	IKM	100	%	25	IKM	55	IKM	68,75
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali**	92,30	%	-	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0%
3	31	03	2.01		Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Mawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Persentase fasilitasi dan pengawasan penertiban izin usaha industri kecil dan menengah	59,09	%	-	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0%
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi	245	rekomendasi	-	0	rekomendasi	0	rekomendasi	0	%	0	rekomendasi	0	rekomendasi	0%

					Kewenangan Kabupaten/Kota									
3	**31**	**04**			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar**	37 %	-	4 %	4 %	100 %	7 %	4 %	10,81%
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional (SINAS)	60 %	-	50 %	50 %	100 %	50 %	50 %	83,33%
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SINAS)	Jumlah data industry yang terintegrasi ke dalam siistem informasi industri nasional (SINAS)	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) uuntuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan PP nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 06 tahun 2008.

Keberhasilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel. 2.2 (Tabel. T-C.30) berikut ini :

Tabel 2.2
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator*)	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021 (thn n -2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	IKK											
	Persentase Koperasi Aktif			76,00%	77,10%	78,15%	79,12%	76,47%	77,32%	78,15%	79,12%	
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM							25,319 UKM	25,725 UKM			
	Usaha Mikro dan Kecil							24,815 UKM	25,701 UKM			
	Jumlah BPR/LKM							70	70			
	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB							4,07%	3,79%			
	Cakupan binaan kelompok pedagang/ usaha informal							38,34%	59,17%			
	Ekspor perdagangan bersih							919.980.853,88$	1.251.398.446,76 $			
	Indikator Kinerja Utama											
	% Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun			90%	95%	95%	97%	103,30%	105,45%	95%	97%	

	Pertumbuhan nilai produksi IKM			0,078%	0,10%	0,12%	0,13%	0,078%	0,112%	0,12%	0,13%	
	Pertumbuhan nilai produksi UMKM			5,16%	7,55%	8,77%	9,68%	5,34%	8,20%	8,77%	9,68%	
	Pertumbuhan sub sektor perdagangan			12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	24,04%	38,32%	12,5%	12,5%	

Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 :

No	Misi/Perangkat Daerah/Urusan	Indikator	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
	Misi II					
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	%	30,82	31,88	102,02
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	31,25	31,88	102,22
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	%	10,71	11,27	105,23
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	%	3,15	4,51	143,17
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	40	40,85	102,13
	Program Pengembangan	Rasio pertumbuhan	%	2,27	2,87	126,43

	UMKM	skala usaha mikro				
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ Direvitalisasi	%	10	8,56	85,6
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	15	36,14	240,93
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	8	6,84	85,50
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	%	5	2,33	46,68
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	dokumen	1	1	100
	Misi IV					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	%	95	103,51	108,95
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin	%	6	7,24	120,67

		usaha simpan pinjam				
	Program Pelayanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar	%	7	7,04	100,57

Tabel. 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian %
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	95%	105,45%	111
2.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	- Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan	- 0,10% - 7,55% - 77,10% - 12,5%	- 0,112% - 8,20% - 77,32% - 38,32%	112,43% 108,60% 100,25% 306,56%
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95%	103,51%	108,95%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 258 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan; pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana dan kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan dan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di kabupaten Luwu Timur.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang perlu dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian terlihat dari pemetaan permasalahan seperti tabel di bawah ini :

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

1. Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM.

2. Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas.
3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan inndustri Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan peran sector industry dan sector perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.
4. Sistem pengelolaan usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.
5. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM.
6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
7. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

Bidang Perdagangan :

1. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah
2. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi
3. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki
4. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan ekspor dan impor

Bidang Perindustrian :

1. Masih rendahnya produktifitas IKM
2. Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM
3. Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk IKM
4. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaku IKM

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian yang telah

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2023.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.4
(Tabel T-C. 31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Luwu Timur

OPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		100%	4,116,573,832	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		100%	4,390,598,991	
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**69,098,699**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**69,347,153**	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		10 dokumen	38,640,540	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		10 dokumen	30,820,500	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2 dokumen	3,463,806	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		1 dokumen	2,531,300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		3 dokumen	24,068,700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu		3 dokumen	33,069,700	

									(Dokumen)				
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)		1 dokumen	2,925,653	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		1 dokumen	2,925,653	
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)**	**DISDAGKOP RINUM**	**100%**	**3,228,269,875**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)**	**DISDAGKOP RINUM**	**100%**	**3,395,001,767**	
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		18 dokumen	36,335,900	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		18 dokumen	48,931,800	
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		28 orang	3,191,933,975	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		28 orang	3,346,069,967	
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)**	**DISDAGKOP-UKM**	**100%**	**9,460,000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)**	**DISDAGKOP-UKM**	**100%**	**19,060,000**	
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		2 dokumen	9,026,310	-	Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		2 dokumen	19,060,000	

4	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)**	**DISDAGKOP RINUM**	**100%**	**5,786,600**	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)**	**DISDAGKOP RINUM**	**100%**	**5,786,600**	
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)		1 dokumen	5,786,600	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)		1 dokumen	5,786,600	
5	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)**	**DISDAGKOP RINUM**	**100%**	**121,651,425**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)**	**DISDAGKOP RINUM**	**100%**	**100,009,040**	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)		3 orang	54,200,000	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)		3 orang	40,740,000	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)		10 orang	43,630,000	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)		10 orang	45,760,000	
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (laporan)		12 laporan	25,621,425	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (laporan)		8 laporan	13,509,040	
6	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)**	**DISDAGKOP RINUM**	**100%**	**398,482,136**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)**	**DISDAGKOP RINUM**	**100%**	**456,511,381**	

	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)		60 examplar	7,320,000	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)		60 examplar	7,320,000	
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		20 unit	12,499,736	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		4 unit	1,573,500	
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)		50 dokumen	14,000,000	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)		50 dokumen	26,000,000	
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		3 jenis	12,800,000	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		3 jenis	12,800,000	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		10 jenis	2,681,200	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		10 jenis	2,678,400	
	-	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		220 kali	333,020,000	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		220 kali	397,244,600	
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		28 jenis	3,263,000	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		20 jenis	3,244,881	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		200 orang	4,000,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		200 orang	5,050,000	

	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)		3 unit	8,898,200	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)		-	-	
7	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**51,519,236**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**82,200,000**	
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		2 unit	20,00,000	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		5 unit	40,000,000	
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		2 unit	6,019,500	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		1 unit	6,000,000	
	-	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		2 unit	25,499,736	-	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		54 unit	36,200,000	
8	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**126,185,861**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**145,713,050**	
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		1500 surat	985,861	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		1500 surat	15,513,050	
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		4 orang	55,800,000	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		4 orang	55,800,000	

	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		5 rekening	68,400,000	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		5 rekening	74,400,000	
9		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)**	**DISDAGKOP-UKM**	**100%**	**107,120,000**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)**	**DISDAGKOP-UKM**	**100%**	**116,970,000**	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)		10 unit	58,850,000	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)		10 unit	58,850,000	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)		3 unit	20,000,000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)		1 unit	30,000,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		54 unit	28,270,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		54 unit	28,120,000	
II		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)**	**Kab. Luwu Timur**	10%	2,059,463,175		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)**	**Kab. Luwu Timur**	10%	1.183.785.200	

10	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)**	**Kab. Luwu Timur**	**5 pasar**	**2,034,453,800**	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)**		**4 pasar**	**1,128,070,800**	
	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/ direvitalisasi serta sarana dan prasarananya (Pasar)		5 pasar	2,034,453,800	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/ direvitalisasi serta sarana dan prasarananya (Pasar)		4 pasar	1,128,070,800	
11	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)	Kab. Luwu Timur	70%	25,009,375	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)		70%	55,714,400	
	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina (Pengelola Pasar)		5 pengelola	25,009,375	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina (Pengelola)		5 pengelola	55,714,400	
III	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	**9%**	**362,833,653**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	**8%**	**335,933,600**	
12	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)**	**Kab. Luwu Timur**	**44%**	**335,933,899**	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)**	**Kab. Luwu Timur**	**44%**	**335,933,600**	

	-	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan (Jurnal Harga)		260 jurnal harga	85,485,420	-	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan (Jurnal Harga)		260 jurnal harga	85,485,200	
	-	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (RTM)		2000 RTM	250,448,479	-	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (RTM)		2000 RTM	250,448,400	
13	**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	**100%**	**26,899,736**	**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)**		**100%**	**26,899,556**	
	-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi (laporan)		64 laporan	26,899,736	-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi (laporan)		84 laporan	26,899,556	
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**Persentase peningkatan nilai ekspor (%)**	**Kab. Luwu Timur**	15%	340,421,000	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**Persentase peningkatan nilai ekspor (%)**	**Kab. Luwu Timur**	15%	304,338,683	
14	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah**		**Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang ('%)**		**20%**	**340,421,000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah**		**Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang ('%)**		**20%**	**304,338,683**	

	Kabupaten/Kota						**Kabupaten/Kota**					
	- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina (pelaku usaha)		25 pelaku usaha	40,000,000	- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina (pelaku usaha)		25 pelaku usaha	35,930,000	
	- Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang (Produk)		1 produk	79,465,000	- Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang (Produk)		1 produk	79,372,240	
	- Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional (Produk)		1 produk	200,805,000	- Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional (Produk)		1 produk	170,809,918	
	- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan produk ekspor (usaha)		225 usaha	20,151,000	- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan produk ekspor (usaha)		225 usaha	18,226,525	
V	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)**	**Kab. Luwu Timur**	5%	188,867,100	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)**	**Kab. Luwu Timur**	5%	157,336,100	
15	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)**		**60%**	**188,867,100**	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)**		**60%**	**157,336,100**	

	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang (alat UTTP)		915 alat UTTP	188,867,100	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang (alat UTTP)		915 alat UTTP	157,336,100	
VI	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)**	**Kab. Luwu Timur**	9,85%	30,923,680	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)**	**Kab. Luwu Timur**	9,85%	25,021,900	
16	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi ('%)**		**7,69%**	**30,923,680**	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi ('%)**		**7,69%**	**25,021,900**	
	- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas (KSP/USP)		20 KSP/USP	30,923,680	- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas (KSP/USP)		20 KSP/ USP	25,021,900	
VII	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	32,63%	100,370,000	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	32,63%	122,068,300	

17	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota ('%)**		75,7%	100,370,000	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)**		75,7%	122,068,300	
	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi (Koperasi)		146 koperasi	100,370,000	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi (Koperasi)		146 koperasi	122,068,300	
VIII	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi sehat ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	32,8%	81,864,800	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi sehat ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	32,8%	75,045,760	
18	**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya('%)**		**51,62%**	**81.864,800**	**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya ('%)**		**51,62%**	**75,400,350**	
	- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian ksehatan KSP/USP (koperasi)		15 koperasi	81,864,800	- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat (KSP/USP)		15 Koperasi	75,400,350	

IX	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	12,18%	93,445,354	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	12,18%	75,526,000	
19	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota ('%)**		25,31%	93,445,354	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)**		25,31%	75,526,000	
	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang diitngkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (koperasi)		15 koperasi	93,445,354	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	15 koperasi		15 koperasi	75,533,040	
X	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha('%)**	**Kab. Luwu Timur**	4,9%	30,563,680	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha('%)**	**Kab. Luwu Timur**	4,9%	25,595,020	

20	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota ('%)**		4,9%	30,563,680	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota ('%)**		4,9%	25,595,020	
	- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Koperasi)		20 koperasi	30,563,680	- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Koperasi)		20 koperasi	25,595,020	
XI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	45%	232,215,324	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	45%	232,912,390	

21	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)**		108 WUB	232,215,324	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)**		108 WUB	232,912,390	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha (usaha mikro)		90 usaha mikro	53,348,700	- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha (usaha mikro)		90 usaha mikro	45,214,150	
	- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra (usaha mikro dan kecil)		50 usaha mikro dan kecil	19,719,500	- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra (usaha mikro dan kecil)		50 usaha mikro dan kecil	28,714,500	
	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS) (usaha mikro)		241 usaha mikro	45,272,534	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS) (usaha mikro)		220 usaha mikro	45,524,225	
	- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (responsif gender) (usaha mikro dan kecil)		70 usaha mikro dan kecil	79,836,440	- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (responsif gender) (Usaha mikro dan kecil)		70 usaha mikro dan kecil	80,501,540	

	- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan (usaha mikro)		40 usaha mikro	34,038,150	- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan (usaha mikro)		40 usaha mikro	33,257,200	
XII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	3,89%	114,461,660	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	3,89%	122,325,650	
22	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)		7,05%	114,461,660	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)		7,05%	114,461,600	
	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha (usaha mikro dan kecil)		17 usaha mikro dan kecil	114,461,660	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha (usaha mikro dan kecil)		17 usaha mikro dan kecil	114,461,600	
XIII	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan**	**Kab. Luwu Timur**	1 dokumen	1,338,583,360	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan**	**Kab. Luwu Timur**	1 dokumen	114,461,600	
23	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi**		1 dokumen	1,338,583,360	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi**		1 dokumen	1,338,583,360	

	-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah revisi dokumen siteplan dan amdal		1 dokumem	1,000,000,000		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah revisi dokumen siteplan dan amdal		1 dokumen	331,725,000	
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina		58 IKM	177,328,860	-	Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina		58 IKM	442,749,300	
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP		20 IKM	47,959,810	-	Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP		20 IKM	51,611,500	
XIV	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali**	**Kab. Luwu Timur**	90,9%	40,000,000	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali**	**Kab. Luwu Timur**	90,9%	24,085,000			
24	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitasi dan Pengawasan Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah**		50%	40,000,000	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitasi dan Pengawasan Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah**		50%	24,085,000		

	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi		55 rekomendasi	40,000,000	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi		55 rekomendasi	24,085,000	
JUMLAH TOTAL						**9,231,595,110**	**JUMLAH TOTAL**					**7,114,861,394**		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal untuk pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan masyarakat, stageholder bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai mitra kerja dinas dalam mewujudkan visi Kabupaten Luwu Timur yakni Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya.

Urusan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan tahun 2023 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya :

1. Urusan wajib (Koperasi dan UKM)

- Usulan stakeholder bidang UMKM melalui program dan kegiatan prioritas berdasarkan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Urusan pilihan (perdagangan dan perindustrian)

- Usulan stakeholder/musrembang bidang perdagangan dan bidang perindustrian melalui program dan kegiatan prioritas berdasarkan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel. 2.5

(TABEL T-C. 32, LAMPIORAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Luwu Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)**		
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dusun Tambak Yoso, Kelurahan Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena	Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)	1 Paket	Pembangunan Pasar Kalaena Kec. Angkona
2	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dusun Rappang Desa Kalosi Kelurahan Kalosi Kecamatan Towuti	Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)	1 Paket	Pembangunan Pasar Malindungi Kec. Nuha
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dusun Bantilang Desa Bantilang Kelurahan Bantilang Kecamatan Towuti	Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)	1 Paket	Pembuatan Tempat Kuliner Pasar Wonorejo Kec. Mangkutana
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dusun Bantilang Desa Bantilang Kelurahan Bantilang Kecamatan Towuti	Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)	1 Paket	Pembuatan Halaman Pasar Wawondula Kec. Towuti

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Propinsi

7 Agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun budaya dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup :

1. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
2. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021, dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan

Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 yaitu ***"Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***

Olehnya itu sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang diserta peningkatan decent job;
4. Pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan pengiatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Arah kebijakan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

1. Pendataan lengkap UMKM disektor non pertanian dalam rangka mendoorng terwujudnya system informasi yang terintegrasi untuk mengotomisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data koperasi dan UMKM;
2. Major project pengelolaan terpadu UMKM sebagai penanggulangan pengangguran dan pemulihan dunia usaha melalui pengembangan rumah produksi bersama/*Factory sharing* dengan target 5 *pilot project* melalui penyediaan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan dimasing-masing lokasi yang terpilih.
3. Mendukung terciptanya koperasi modern melalui: (1) korporatisasi petani dan nelayan untuk mencapai skala ekonomi dan memberikan *value added* tinggi melalui model bisnis yang berorientasi industri (2) pengembangan sistem pengawasan terhadap koperasi bermasalah berdasarkan tata kelola,

profil resiko,kinerja keuangan dan permodalan, (3) pengiatan regulasi melalui revisi RUU Perkoperasian;

4. Pengembangan PLUT-UMKM, merupakan rumah bagi UMKM untuk belajar mendapatkan akses terhadap informasi, pasar maupun pembiayaan
5. Redesign PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM) – KUMKM untuk mendoorng tata kelola PLUT-KUMKM yang diperkuat untuk pengembangan koperasi, UMKM, wirausaha dalam memajukan potensi unggulan daerah melalui: (1) penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan usaha, (2) pusat pengembangan produk unggulan daerah, (3) fasilitasi pendaftaran dan perizinan UMKM, (4) peningkatan sinergi dengan mitra strategis, (5) penyediaan *Market Place* dan *Public Space;*
6. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penguatan koperasi dan UMKM serta penciptaan lapangan kerja melalui penumbuhan wirausaha dengan fasilitasi akses pembiayaan melalui bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro dan pendampingan sertfikasi produk usaha mikro, akses pasar melalui revitalisasi pasar rakyat, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem.;
7. Pengembangan kewirausahaan nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pemula dan mapan;
8. Pengembangan rumah kemasan sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan;

Urusan Perdagangan

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan :

1. Kestabilan harga dan keteresediaan barang kebutuhan pokok untuk perdagangan dalam negeri;
2. Pengembangan pasar baru dengan prioritas di pasar non tradisional melaui perkuatan logistic nasional, pemanfaatan teknologi digital, menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen;
3. Meningkatkan produk ekspor manufaktur dan partisipasi dala rantai nilai gobal (global value chain)

Urusan Perindustrian

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian:

1. Industri 4.0, resolusi industri 4,0 merupakan strategi mempercepat pencapaian target pengembangan industri dengan penguatan rantai nilaiuntuk industri bahan baku/hulu, pengolahan/antara serta produk siap konsumsi/hilir, pengembangan wilayah industri, pengembangan jaringan pasar serta pengembangan kapasitas tenaga kerja;
2. Aspirasi making Indonesia 4,0 melalui peningkatan daya saing dengan target 10% porsi ekspor netto terhadap PDB, meningkatan rasio produktifitas tenaga kerja, meningkatkan pengeluaran litbang nasional hingga 2% dari PDB

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan :

1. Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri danUMKM
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

3.2.2 Sasaran :

1. Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting,dengan indikator :
   - Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun
2. Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM dengan indikator :
   - Pertumbuhan nilai produksi UMKM
   - Pertumbuhan nilai produksi IKM
   - Persentase Koperasi Aktif
   - Pertumbuhan sub sektor perdagangan

3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah, dengan indikator :
   - Persentase capaian kinerja program perangkat daerah

Tabel.5

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat	Pengeluaran/ Kapita	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang waktu	95%
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor UMKM	% UMKM yang naik kategori	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	- Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Pertumbuhan nilai produksi IKM - % Koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan	8,77% 77,10% 78,15% 0,12%
3.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95%

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur merencanakan 15 program dengan 25 kegiatan dan 55 sub.kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Program Utama

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

– **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

- Sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan

– **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

- Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

– **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

- Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

– **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

3. Program PENGEMBANGAN EKSPOR

– **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
- Sub kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

- Sub kegiatan Pameran Dagang Nasional
- Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

– **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

– Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

5. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

– **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

– **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

– Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

7. **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**

– **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

– Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

– **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

– Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
  - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

- **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
  - Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

11. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

- **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**
  - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

12.**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

– **KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

– **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

– **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

– **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

– **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

– **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Pengadaan mebel
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
– **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
– **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merencanakan 15 program dan 25 kegiatan dan 55 sub.kegiatan dengan pagu indikatif Rp.8.022.002.750. Alokasi Program, kegiatan dan sub.kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Rencana Kerja tahun 2023		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**		100%	4,390,598,991
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)**	**DISDAGKO PRINUM**	**100%**	**69,347,153**
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		10 dokumen	30,820,500
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		1 dokumen	2,531,300
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		3 dokumen	33,069,700
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		1 dokumen	2,925,653
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)**	**DISDAGKO PRINUM**	**100%**	**3,395,001,767**
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		18 dokumen	48,931,800

-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		28 orang	3,346,069,967
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)**	**DISDAGKOP-UKM**	**100%**	**19,060,000**
-	Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		2 dokumen	19,060,000
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**5,786,600**
-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)		1 dokumen	5,786,600
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**100,009,040**
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)		3 orang	40,740,000
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)		10 orang	45,760,000
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (laporan)		8 laporan	13,509,040
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**456,511,381**
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)		60 examplar	7,320,000
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		4 unit	1,573,500
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)		50 dokumen	26,000,000
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		3 jenis	12,800,000

-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		10 jenis	2,678,400
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		220 kali	397,244,600
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		20 jenis	3,244,881
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		200 orang	5,050,000
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)		-	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**82,200,000**
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		5 unit	40,000,000
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		1 unit	6,000,000
-	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		54 unit	36,200,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)**	**DISDAGKOPRINUM**	**100%**	**145,713,050**
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		1500 surat	15,513,050
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		4 orang	55,800,000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		5 rekening	74,400,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)**	**DISDAGKOP-UKM**	**100%**	**116,970,000**
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)		10 unit	58,850,000

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)		1 unit	30,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		54 unit	28,120,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)**	**Kab. Luwu Timur**	10%	1.183.785.200
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)**		**4 pasar**	**1,128,070,800**
-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/ direvitalisasi serta sarana dan prasarananya (Pasar)		4 pasar	1,128,070,800
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)		70%	55,714,400
-	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina (Pengelola)		5 pengelola	55,714,400
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	**8%**	**335,933,600**
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		**Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)**	**Kab. Luwu Timur**	**44%**	**335,933,600**
-	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan (Jurnal Harga)		260 jurnal harga	85,485,200
-	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (RTM)		2000 RTM	250,448,400
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)**		**100%**	**26,899,556**

-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi (laporan)		84 laporan	26,899,556
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		**Persentase peningkatan nilai ekspor (%)**	**Kab. Luwu Timur**	15%	304,338,683
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang ('%)**		**20%**	**304,338,683**
-	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina (pelaku usaha)		25 pelaku usaha	35,930,000
-	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang (Produk)		1 produk	79,372,240
-	Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional (Produk)		1 produk	170,809,918
-	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan produk ekspor (usaha)		225 usaha	18,226,525
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		**Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)**	**Kab. Luwu Timur**	5%	157,336,100
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		**Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)**		**60%**	**157,336,100**
-	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang (alat UTTP)		915 alat UTTP	157,336,100
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		**Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)**	**Kab. Luwu Timur**	9,85%	25,021,900
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi ('%)**		**7,69%**	**25,021,900**

-	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas (KSP/USP)		20 KSP/ USP	25,021,900
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		**Persentase koperasi yang berkualitas ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	32,63%	122,068,300
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)**		75,7%	122,068,300
-	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi (Koperasi)		146 koperasi	122,068,300
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		**Persentase koperasi sehat ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	32,8%	75,045,760
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya ('%)**		**51,62%**	**75,400,350**
-	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat (KSP/USP)		15 Koperasi	75,400,350
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	12,18%	75,526,000
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)**		25,31%	75,526,000
-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	15 koperasi		15 koperasi	75,533,040
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		**Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan,**	**Kab. Luwu Timur**	4,9%	25,595,020

		penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha('%)			
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota ('%)**		4,9%	25,595,020
-	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Koperasi)		20 koperasi	25,595,020
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		**Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	45%	232,912,390
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		**Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)**		108 WUB	232,912,390
-	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha (usaha mikro)		90 usaha mikro	45,214,150
-	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra (usaha mikro dan kecil)		50 usaha mikro dan kecil	28,714,500
-	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS) (usaha mikro)		220 usaha mikro	45,524,225
-	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (responsif gender) (Usaha mikro dan kecil)		70 usaha mikro dan kecil	80,501,540

-	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan (usaha mikro)		40 usaha mikro	33,257,200
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		**Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)**	**Kab. Luwu Timur**	3,89%	122,325,650
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)		7,05%	114,461,600
-	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha (usaha mikro dan kecil)		17 usaha mikro dan kecil	114,461,600
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan**	**Kab. Luwu Timur**	1 dokumen	114,461,600
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi**		1 dokumen	1,338,583,360
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah revisi dokumen siteplan dan amdal		1 dokumen	331,725,000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina		58 IKM	442,749,300
-	Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP		20 IKM	51,611,500

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali**	**Kab. Luwu Timur**	90,9%	24,085,000
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		**Persentase fasilitasi dan Pengawasan Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah**		50%	24,085,000
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi		55 rekomendasi	24,085,000
JUMLAH TOTAL					**8,022,002,750**

BAB V
PENUTUP

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertical sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 15 program, 25 kegiatan dan 55 sub.kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya , tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program ,kegiatan dan sub.kegiatan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu member kontribusi terhadap capaian target pembangunan kabupaten Luwu Timur.

Renja Tahun 2023 adalah pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Revisi 2021-2026.

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Semoga RENJA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Malili, Juni 2022

KEPALA DINAS,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP:19751001 199612 1 001